

## Inovasi Pelayanan Publik E-Samsat Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah di Provinsi Jawa Barat

Nabila Hasna Soraya  
Politeknik STIA LAN Bandung  
e-mail : [Nabilahsn9@gmail.com](mailto:Nabilahsn9@gmail.com)

### Abstrak

Isu-isu buruknya sistem pelayanan publik di Indonesia masih menjadi tuntutan bagi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu dengan menciptakan suatu implementasi pelayanan publik berbasis teknologi. Kemajuan teknologi saat ini dimanfaatkan pemerintah sebagai suatu solusi untuk bisa menciptakan pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung proses pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Penciptaan inovasi ini juga bertujuan agar timbal balik yang didapatkan pemerintah bisa maksimal. Dari permasalahan ini membuat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat di tahun 2016 memutuskan untuk mewujudkan sebuah aplikasi pelayanan publik dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui aplikasi E-Samsat. E-Samsat menjadi terobosan baru di pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk implementasi kemajuan teknologi yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor. Aplikasi E-Samsat ini juga merupakan inovasi yang diciptakan dengan kesepakatan kerja antara Samsat Provinsi Jawa Barat, Kepolisian Republik Indonesia dan Bank Jabar (BJB). Adapun penelitian ini ditulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan melalui studi literatur dan studi pendahuluan. Pada penelitian ini lebih berfokus terhadap konsep pemikiran yang memberitahukan fakta bahwa dengan adanya inovasi pelayanan publik E-Samsat mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membantu upaya peningkatan pendapatan daerah di Provinsi Jawa Barat.

**Kata Kunci:** Inovasi; Pelayanan Publik; E-Samsat

### *E-Samsat Publis Service Innovation in an Effort to Increase Regional Revenue in West Java Province*

#### Abstract

*Issues of poor public service systems in Indonesia are still a demand for the bureaucracy to improve the quality of public services, namely by creating a technology-based implementation of public services. Current technological advances are used by the government as a solution to be able to create public services that are expected by the community. This is done to support the public service process to be more effective and efficient. This innovation creation also aims to maximize the reciprocity that the government gets. From this problem, the Regional Revenue Agency of West Java Province in 2016 decided to create a public service application in order to increase regional revenue through the E-Samsat application. E-Samsat is a new breakthrough in the West Java Provincial government as a form of implementing technological advances that are expected to be able to increase local revenue, one of which is through motor vehicle tax payments. The E-Samsat application is also an innovation created with a work agreement between the West Java Province Samsat, the Indonesian National Police and the West Java Bank (BJB). The research is written using a qualitative descriptive method with an approach through literature studies and predecessor studies. In this study, it focuses more on the concept of thinking which informs the fact that the existence of E-Samsat public service innovation is able to improve the quality of public services and help efforts to increase regional income in West Java Province.*

**Keywords:** Innovation; Public service; E-Samsat

## A. PENDAHULUAN

Penyedia Pelayanan Publik (*Public Service Provider*) merupakan suatu paradigma baru bagi pemerintah. Pelayanan publik yang responsif, berorientasi pada rakyat, memudahkan dan menampung aspirasi menjadi tugas utama pemerintah baik pusat maupun daerah. Pelayanan publik yang mumpuni mampu meningkatkan kualitas interaksi pemerintah dengan masyarakat sekaligus sebagai acuan peningkatan potensi ekonomi masyarakat. Pelayanan publik saat ini telah menjadi topik penting yang memaksa institusi negara baik birokrasi maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang terpadu. Membangun pelayanan publik juga sebagai suatu strategi pemerintah untuk bisa meningkatkan pendapatan salah satunya pendapatan daerah. Pendapatan daerah salah satunya diperoleh dari pembayaran pajak yakni pajak kendaraan bermotor. Dari segi pendapatan, pajak atas kendaraan bermotor merupakan sumber pemasukan yang besar bagi pemerintah daerah, karena semua menyadari bahwa kendaraan bermotor merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat Indonesia saat ini (Gizela, 2017).

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, ada tiga sudut pandang yang menetapkan indikator kualitas pelayanan menurut (Deddy, 2016), yaitu:

- a) Pengaruh kebijakan pemerintah yang menerima mandat dari masyarakat untuk melayani (amanah).
- b) Kualitas yang ditetapkan. Dalam hal ini kualitas menjadi pendukung utama suatu pelayanan publik bisa berjalan dengan baik.
- c) Penilaian terhadap birokrasi yang melakukan pelayanan. Dimana masyarakat akan merasakan kepuasan jika merasa dilayani dengan baik oleh pemberi layanan publik.

Dengan adanya indikator kualitas pelayanan publik tersebut, diharapkan mampu menjadi tolak bahwa pelayanan publik sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Adapun faktor lain yang menjadi indikator keberhasilan pelayanan publik menurut (Fandi, dkk. 2019) yaitu adanya pemanfaatan teknologi

informasi yang secara langsung dapat menciptakan koordinasi yang bersinergitas antar divisi di dalam organisasi. Kemajuan teknologi diharapkan mampu membuat kualitas pelayanan publik lebih efektif. Hal ini mendorong pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengimplemetasikannya dalam hal pelayanan publik berbasis digital dilingkungan birokrasi. Teknologi yang berkembang pesat hampir mempermudah segala urusan diberbagai bidang menjadi alasan pemerintah harus bisa mengkolerasikan hal tersebut agar lebih mudah menjangkau serta mencapai tujuan yang diharapkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menciptakan suatu inovasi berbasis teknologi bernama E-Samsat. Dengan adanya E-Samsat Bapenda Provinsi Jawa Barat berharap masyarakat lebih mudah untuk membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor yang menjadi sumber pendapatan asli daerah. Inovasi ini diciptakan dengan kesepakatan kerjasama antara Samsat Provinsi Jawa Barat dan Bank Jawa Barat (BJB). Masyarakat dianggap sudah bisa mengakses teknologi secara merata sehingga dengan adanya inovasi ini justru akan sangat membantu dan mempermudah. Namun pada kenyataannya meskipun inovasi ini telah diterapkan masih saja ada permasalahan yang terjadi seperti kurangnya sosialisasi yang membuat masyarakat masih minim pengetahuan tentang E-Samsat. Akan tetapi, tentu adanya pembenahan pelayanan publik yang melibatkan teknologi ini diiharapkan mampu mendorong antusiasme masyarakat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor.

Beriringan dengan penetapan regulasi otonomi daerah membuat pemerintah daerah harus mampu menghasilkan pendapatan asli daerah agar dapat meminimalkan ketergantungan terhadap bantuan pendanaan dari pusat (Putu et al., 2018). Hal ini juga berkaitan dengan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang menyatakan bahwa Pengembangan e-government merupakan suatu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik/teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan

publik agar lebih efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government ini diharapkan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dapat optimal dalam memanfaatkan teknologi informasi. Dan dalam mencapai proses tersebut terdapat mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu :

- 1) Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; ini merupakan suatu bentuk implementasi teknologi ke dalam lingkungan pemerintahan dalam menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.
- 2) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di wilayah negara. Ini juga merupakan suatu upaya pemerataan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat.

Hal tersebut menjadi dasar bagi Bapenda Provinsi Jawa Barat untuk menciptakan inovasi E-Samsat sebagai salah satu amanat konstitusi yang bertujuan untuk kemudahan masyarakat.

Dalam implementasinya, inovasi ini melibatkan banyak pihak antara lain Bank BJB, Tim Pembina Samsat Prov. Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat, dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Barat dalam meluncurkan program inovasi layanan sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) yang berbasis elektronik atau e-Samsat Jabar. E-Samsat Jabar ini juga merupakan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan dimana bentuk layanan pembayaran e-Samsat Jabar ini adalah salah satu layanan terbaik Bank BJB bagi para nasabahnya, khususnya dalam hal pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan dengan mengedepankan kemudahan untuk masyarakat sehingga tidak perlu mengantri lama untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya, karena pembayaran dapat diakses diseluruh mesin ATM bank BJB yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, dari beberapa peneliti sebelumnya diketahui bahwa inovasi pelayanan publik di Indonesia masih kurang efektif dan efisien. Dan dengan adanya inovasi pelayanan publik E-Samsat mampu mendorong

peningkatan pendapatan daerah melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sehingga peneliti mengambil tema ini yang didalamnya menjelaskan pengaruh signifikan yang terjadi dari inovasi pelayanan publik melalui aplikasi E-Samsat yang mampu membantu pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Provinsi Jawa Barat

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau yang biasa dikenal dengan istilah Samsat merupakan suatu sistem yang dibuat dalam rangka melancarkan dan mempercepat proses pelayanan publik bagi masyarakat yang diselenggarakan dalam satu tempat. Salah satu peran Samsat sebagai fasilitator pelayanan publik adalah sebagai tempat untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang bekerjasama langsung dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai pengelola pungutan pajak di wilayah Provinsi (Bapenda). Kegiatan diatas merupakan suatu upaya efektif yang dibuat pemerintah dalam mengelola keuangan dan pengumpulan dana dari masyarakat sesuai kewajibannya sebagai sumber pendapatan bagi daerah.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah menimbang bahwa pajak daerah dan restribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Di Provinsi Jawa Barat, kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta No. 528, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat.

### 2. Inovasi Pelayanan Publik E-Samsat

E-Samsat merupakan upaya pemerintah dalam menyikapi kemajuan teknologi dan pengembangan *e-Government* di lingkungan pemerintah untuk bisa memudahkan interaksi dengan masyarakat secara online dan digital. E-Samsat merupakan satu dari berbagai terobosan yang dibuat oleh Bapenda bekerjasama sama

dengan PUSLIA Bapenda Provinsi Jawa Barat sebagai Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan. Adapun terobosan inovasi yang dibuat antara lain *Samsat J'bret*, *Samsat Outlet*, *Samades*, dan *Samling*. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebutkan bahwa rangkaian program berbasis teknologi tersebut sebagai bentuk adaptasi pemerintah daerah dengan perkembangan zaman yaitu teknologi pelayanan publik. Dimana dengan adanya fasilitas online seperti ini masyarakat mampu mengikuti dan kewajiban pun tertunaikan sehingga pendapatan daerah dapat meningkat untuk kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan.

E-Samsat mulai diimplementasikan sejak 22 November 2014. Pelaksanaan layanan E-Samsat Jabar didasari oleh Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan PKB dan BBNKB. Layanan E-Samsat Jabar juga diakomodir pula dengan hadirnya Peraturan Presiden No 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Melalui kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor ini tentunya telah menghadirkan berbagai capaian positif salah satunya ketat masyarakat terhadap membayar pajak kendaraan bermotor serta akselerasi capaian peningkatan pendapatan daerah pada sektor penerimaan pajak kendaraan bermotor.

### 3. Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Dengan adanya penerapan inovasi berbasis teknologi yaitu E-Samsat tentunya memberikan dampak khususnya bagi pendapatan Provinsi Jawa Barat. Dilansir dari Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Barat Februari 2019 Bank Indonesia menyebutkan bahwa pendapatan Provinsi Jawa Barat dalam APBD 2018 ditargetkan mencapai 33,26 Triliun atau meningkat sebesar 6,03% dibandingkan target 2017. Hal ini merupakan bentuk optimis Pemerintah Jawa Barat terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang mendorong pendapatan daerah.

Tabel 2. 2 Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat 2017 dan 2018

No.	Uraian	APBD 2017-P (Rp Miliar)	APBD 2018-P (Rp Miliar)	% Perubahan (yoy)
<b>I</b>	<b>PAD</b>	<b>17.121</b>	<b>18.817</b>	<b>9,91</b>
	a. Pajak Daerah	15.627	17.382	11,23
	b. Retribusi Daerah	60	45	-24,58
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	360	350	-2,80
	d. Lain-lain PAD	1.075	1.040	-3,18
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>14.110</b>	<b>14.379</b>	<b>1,91</b>
	a. Bagi Hasil Pajak	1.812	1.610	-11,14
	b. Dana Alokasi Umum	3.011	3.024	0,42
	c. Dana Alokasi Khusus	9.287	9.746	4,94
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan</b>	<b>141</b>	<b>68</b>	<b>-51,66</b>
	a. Bantuan Keuangan (Hibah)	24	22	-6,39
	b. Lain-lain Penerimaan	8	34	0
	c. Dana Penyesuaian dan Otsus	110	12	-88,79
<b>Total Pendapatan</b>		<b>31.372</b>	<b>33.265</b>	<b>6,03</b>

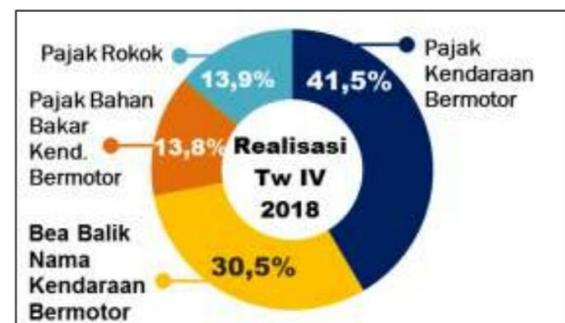
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Barat (diolah)

Menurut Laporan Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat 2017 dan 2018 menunjukkan bahwa Pajak Daerah menyumbang pendapatan yang paling besar bagi daerah sebesar 15,627% di tahun 2017 dan meningkat sebesar 17,382% di tahun 2018 dengan persentase selisihnya sebesar 9,9%.

Kenaikan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat juga beriringan dengan capaian pemerintah yang fokus pada Sembilan program prioritas pembangunan salah satunya Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

### 4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut KEKR Provinsi Jawa Barat, hingga triwulan IV 2018 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat mencapai Rp. 20,08 Triliun atau sebesar 106,72% terhadap target. Dan yang mendominasi terhadap peningkatan PAD tersebut berasal dari pangsa realisasi pajak daerah yakni Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 41,5% disusul dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 30,5% dari grafik berikut :



Sumber: BPKAD Pemprov Jabar (diolah)

Gambar 1

Hal ini sejalan dengan implementasi E-Samsat yang membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan karakteristik Jawa Barat sebagai daerah padat penduduk dengan penggunaan kendaraan bermotor yang tinggi. Akselerasi pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh dalam meningkatnya pendapatan asli daerah.

Komponen pajak daerah selalu menjadi penyumbang pendapatan tertinggi dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pangsa Pajak Kendaraan Bermotor mencapai 5,35%.

Bersumber dari detiknews, Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan bahwa penerapan E-Samsat di Jawa Barat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari 50%. Hal ini karena meningkatnya kepatuhan wajib pajak membayar kendaraan bermotor dan kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat yang tidak perlu lagi mengantri hanya dengan mengakses melalui *smartphone* dan bekerjasama dengan Bank BJB melalui *m-banking* maupun *Fintech (Financial Technology)*.

Penerapan E-Samsat menyumbang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula hanya sebesar Rp9 triliun menjadi Rp14 triliun dengan kenaikan sebesar Rp5 triliun. Pembayaran kendaraan yang menjadi mudah, nyaman dan cepat membuat masyarakat menjadi taat akan kewajiban dan harus terus ditingkatkan.

analisis mengenai pendapatan yang dianggap signifikan di wilayah Provinsi Jawa Barat bahwa PAD dengan kontribusi terbesar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). BPS mencatat jumlah kendaraan bermotor di Jawa Barat pada Maret 2018 mencapai 16.085.120 unit. Terdiri dari roda 2 sebanyak 13.725.590 unit (85,33%) dan sisanya roda 4 sebanyak 2.359.530 unit (14,67%).

**Tabel Nilai Penerimaan E-Samsat terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat dari 2016-2019.**

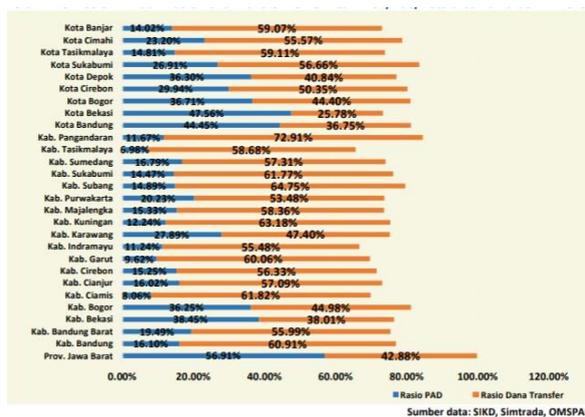
Unit	2016	2017	2018	2019
P	Rp8,160,	Rp15,997	Rp114,807	Rp,404,62
K	873,700	,010,300	,501,800	0,908,500
B	miliar	miliar	miliar	miliar

Berdasarkan data bersumber dari radarcierbon.com terjadi peningkatan PAD secara signifikan di tahun 2019 sebesar Rp404,620,908,500 miliar. Dan selisih dengan tahun 2018 sebesar Rp289,813,406,700 miliar. Tentunya ini merupakan prestasi yang bagus bagi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang berhasil meningkatkan PAD melalui inovasi E-Samsat.

### C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya terkait Inovasi Pelayanan Publik E-Samsat Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah di Provinsi Jawa Barat, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Inovasi pelayanan publik E-Samsat yang diterapkan di Provinsi Jawa Barat membantu meningkatkan pendapatan daerah karena inovasi tersebut memudahkan masyarakat dalam membayar pajak dan secara tidak langsung sebagai bentuk implementasi teknologi di lingkungan pemerintah.
2. Dengan adanya penerapan inovasi berbasis teknologi yaitu E-Samsat tentunya memberikan dampak positif khususnya bagi pendapatan Provinsi Jawa Barat. Dilansir dari Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Barat



**Gambar 2**

Rasio PAD Jabar di tahun 2019 sebesar 56,91%. Menurut (*Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Barat Februari 2019, 2019*)

Februari 2019 Bank Indonesia menyebutkan bahwa pendapatan Provinsi Jawa Barat dalam APBD 2018 ditargetkan mencapai 33,26 Triliun atau meningkat sebesar 6,03% dibandingkan target 2017.

3. Dengan peningkatan pendapat tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimis terhadap pertumbuhan pendapatan regional yang bisa dialokasikan untuk pembangunan berkelanjutan.
4. Dengan adanya progress tersebut, membuktikan bahwa pendapatan daerah yang paling banyak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Jawa Barat bersumber dari pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui E-Samsat.

Berdasarkan simpulan uraian diatas, maka saran penulis untuk memberikan motivasi terhadap beberapa pencapaian yang harus dipertahankan setelah adanya inovasi E-Samsat yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

1. Pelayanan E-Samsat yang sudah berbasis digital bisa terus di *upgrade* baik dari aplikasi dan SOP nya yang harus berorientasi terhadap keamanan, kemudahan dan efisien.
2. Diharapkan dengan adanya inovasi E-Samsat ini masyarakat menjadi lebih taat dan patuh terhadap kewajiban membayar pajak.
3. Peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat nantinya bisa dimanfaatkan untuk membangun daerah tertinggal, pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dialokasikan untuk pembangunan desa tertinggal sehingga seluruh elemen masyarakat bisa merasakan adanya manfaat inovasi pelayanan publik berbasis digital dan teknologi ini secara merata khususnya di daerah Provinsi Jawa Barat.

#### D. REFERENSI

##### Buku

- Mulyadi, Deddy, dkk. 2016. *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: CV Alvabeta.  
<http://eprints.unm.ac.id/11661/1/Jurnal%20Dani%20Darmawan%201465141012.pdf>

##### Jurnal

- Ahmad, Fandi. Ricky Adi, Hafid Raditya. 2019. *PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI SARANA EVALUASI PEGAWAI OUTSOURCING DI STIA LAN BANDUNG*. E-Journal BKN.
- Wiwiet, H. 2016. *Implementasi Kebijakan E-Samsat Di Jawa Barat*, Jia STIALAN Bandung, Vol 13 (3), p 242-247
- Gizela, M. 2017. *Efektivitas Penggunaan E-Samsat Sebagai Media Pelayanan Informasi Masyarakat Surabaya*. Jurnal Administrasi Publik (JAP).
- Ni Putu Gina, Ida Bagus. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol 7(2).

##### Internet

- Akfa, N. 2019. *Pendapatan Daerah Jabar Diperkirakan Naik Jadi Rp 41 T di 2020*. <https://news.detik.com/berita/d-4765258/pendapatan-daerah-jabar-diperkirakan-naik-jadi-rp-41-t-di-2020>
- Bank Indonesia. 2019. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Barat Februari 2019*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/jabar/Pages/Kajian-Ekonomi-dan-Kuangan-Regional-Provinsi-Jawa-Barat-Februari-2019.aspx>
- Bapennas. 2009. *Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government*. <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/produk-hukum-peraturan-perundangan/inpres/inpres-no3-tahun-2003-tentang-kebijakan-dan-strategi-nasional-pengembangan-e-government/>
- Bank BJB. 2020. *Bjb E-Samsat*. <https://www.bankbjb.co.id/inovasi/ina/e-samsat>
- Erna, M. 2019. *e-Samsat di Jabar Tingkatkan PAD Pajak Kendaraan hingga 50 Persen*. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4555374/e-samsat-di-jabar-tingkatkan-pad-pajak-kendaraan-hingga-50-persen>
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal

- Pembendaharaan. 2019. *Kajian Fiskal Regional Tahunan Provinsi Jawa Barat 2019*. [http://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file\\_artikel/file\\_pdf/kfr/2019/13\\_kfr2019\\_jabar.pdf](http://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/kfr/2019/13_kfr2019_jabar.pdf)
- Radar Cirebon. 2020. *Nilai Penerimaan E-Samsat Jawa Barat 2019 lewat E-Commerce Capai Rp 406Miliar*. <https://www.radarcirebon.com/2020/03/11/nilai-penerimaan-e-samsat-jawa-barat-2019-lewat-e-commerce-capai-rp-406-miliar/>
- Warta Ekonomi. 2019. *Terus Gencarkan E-Samsat, PAD Jawa Barat Naik*. <https://www.radarcirebon.com/2020/03/11/nilai-penerimaan-e-samsat-jawa-barat-2019-lewat-e-commerce-capai-rp-406-miliar/>